



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- bahwa upaya mengoptimalkan kinerja, produktivitas kerja dengan penerapan asas keadilan, proporsionalitas, peningkatan kesejahteraan pegawai, dan sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai;
 - bahwa dengan memperhatikan asas konsistensi kebijakan maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 3 Tahun 2021 tentang



	Paraf
OPD	Bag. Hukum

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Paraf	
DPD	Bag. Hukum
	

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

Paraf	
DPD	Bag. Hukum
	


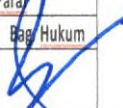
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 ;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 111),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

	Paraf
	
OPD	Bag. Hukum

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

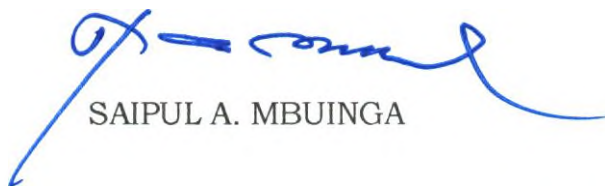
- (1) Besaran Basic TPP ASN digunakan sebagai dasar perhitungan nominal presentase TPP ASN, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 1 Maret 2021

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
Pada tanggal, 1 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISWANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR . 23

PARAF KOORDINASI						
KAB. POHUWATO	KEPALA BAKORAS	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO


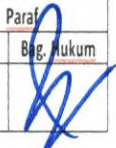
NOMOR : 20 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 Maret 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 3
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2021

1 TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA


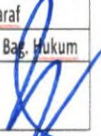
NO	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH TTP (Rp)
1	SEKRETARIS SKPD	12	5.235.792
2	SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH	12	5.312.789
3	IRBAN PADA INSPEKTORAT DAERAH	11	5.238.487
4	KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DPRD	11	5.655.185
5	ESELON III B	11	4.166.978
6	ESELON IV	9	2.297.204
	ESELON IV	8	2.280.789
7	S T A F	7	1.436.402
	S T A F	6	1.414.646
	S T A F	5	1.387.966
	S T A F	4	1.384.737
	S T A F	3	1.382.037
8	STAF PADA INSPEKTORAT DAERAH	7	1.436.402
	STAF PADA INSPEKTORAT DAERAH	6	1.414.646
9	PENILIK OLAH RAGA, PENILIK PLS, PENGAWAS PAUD DAN PENGAWAS TK/SD MADYA	11	2.202.546
	PENILIK OLAH RAGA, PENILIK PLS, PENGAWAS PAUD DAN PENGAWAS TK/SD MUDA	9	2.162.074
	PENILIK OLAH RAGA, PENILIK PLS, PENGAWAS PAUD DAN PENGAWAS TK/SD PERTAMA	8	2.135.977

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	



10	PENGAWAS SMP MADYA	11	2.738.300
	PENGAWAS SMP MUDA	9	2.702.593
	PENGAWAS SMP PERTAMA	8	2.679.022
11	GURU PAMONG BELAJAR MADYA	11	1.309.622
	GURU PAMONG BELAJAR MUDA	9	1.306.253
	GURU PAMONG BELAJAR PERTAMA	8	1.303.308
12	KEPALA SEKOLAH TK/RA, SD/MI, SMP/MTs	11	1.428.678
	KEPALA SEKOLAH TK/RA, SD/MI, SMP/MTs	9	1.396.340
	KEPALA SEKOLAH TK/RA, SD/MI, SMP/MTs	8	1.375.714
13	GURU TK/RA, SD/MI, SMP/MTs MADYA	11	1.250.093
	GURU TK/RA, SD/MI, SMP/MTs MUDA	9	1.216.167
	GURU TK/RA, SD/MI, SMP/MTs PERTAMA	8	1.194.699
14	STAF MERANGKAP PENGAJAR TK/SD DAN SMP	5	1.085.281
15	STAF TK/SD DAN SMP	7	1.081.788
	STAF TK/SD DAN SMP	6	1.064.107
	STAF TK/SD DAN SMP	5	1.041.981
	STAF TK/SD DAN SMP	4	1.030.863
	STAF TK/SD DAN SMP	3	1.179.771
16	PUSTAKAWAN MADYA/ ARSIPARIS MADYA	11	3.333.583
	PUSTAKAWAN MUDA/ ARSIPARIS MUDA	9	2.657.549
	PUSTAKAWAN PERTAMA/PENYELIA / ARSIPARIS PERTAMA/PENYELIA	8	2.461.804
	PUSTAKAWAN MAHIR/ ARSIPARIS MAHIR	7	1.979.642
	PUSTAKAWAN TERAMPIL/ ARSIPARIS TERAMPIL	6	1.954.962

2. TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA


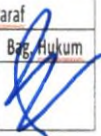
NO	JENIS JABATAN		JUMLAH TTP
1	SEKRETARIS DAERAH	15	24.663.322
2	ASISTEN	14	10.836.332

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	


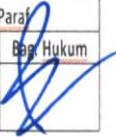
3	INSPEKTUR DAERAH	14	12.660.270
4	KEPALA BKD	14	11.158.204
5	KEPALA BAPERLITBANG	14	9.441.557
6	KEPALA DUKCAPIL	14	9.441.557
7	KEPALA BKPPD	14	9.441.557
8	ESELON II B	14	9.441.557
9	STAF AHLI	13	9.339.659
10	DIREKTUR RSUD	12	9.239.633
11	CAMAT	12	5.774.771
12	KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH	12	5.697.774
13	KEPALA BAGIAN ULP	12	9.239.633
14	SEKRETARIS BKD	12	7.160.715
15	SEKRETARIS BAPERLITBANG	12	5.235.792
16	ESELON III MERANGKAP POKJA UKPBJ	11	9.226.880
	ESELON IV MERANGKAP POKJA UKPBJ	9	7.747.432
	ESELON IV MERANGKAP POKJA UKPBJ	8	7.602.630
	KEPALA BAGIAN KEUANGAN PADA SEKWAN	11	5.697.774
17	ESELON III PADA BKD	11	5.833.769
18	ESELON IV PADA BKD	9	3.693.543
	ESELON IV PADA BKD	8	3.656.503
19	ESELON IV PADA BKD Selaku Satgas SPIP	9	3.918.759
	ESELON IV PADA BKD Selaku Satgas SPIP	8	3.873.721
20	ESELON IV Selaku Satgas SPIP SKPD	9	2.702.593
	ESELON IV Selaku Satgas SPIP SKPD	8	2.679.022
21	ESELON IV Selaku Satgas SPIP pada Inspektorat Da	8	2.715.225
22	KASUBID PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN	9	3.693.543
23	KASUBAG KEUANGAN Dan PERENCANAAN Pada BKD	9	3.918.759
24	BENDAHARA PENGELUARAN,PENERIMAAN, dan Pengurus Barang Pada BKD	7	2.777.043
25	BENDAHARA PENGELUARAN Pada SKPD	7	2.234.403
	BENDAHARA PENGELUARAN PADA INSPEKTORAT	7	2.298.243
26	BENDAHARA PENERIMAAN SKPD	7	1.979.042
27	PENGURUS BARANG SKPD	7	2.266.323
	PENGURUS BARANG SKPD	6	2.246.790

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	


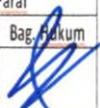
	PENGURUS BARANG SKPD	5	2.220.746
28	PENGURUS BARANG PADA INSPEKTORAT DAERAH	7	2.298.243
	PENGURUS BARANG PADA INSPEKTORAT DAERAH	6	2.274.528
29	PEMBANTU PENGURUS BARANG	7	1.979.042
	PEMBANTU PENGURUS BARANG	6	1.969.409
	PEMBANTU PENGURUS BARANG	5	1.966.285
30	FUNGSI VERIFIKASI SKPKD	7	3.096.244
	FUNGSI VERIFIKASI SKPKD	6	3.078.935
	FUNGSI VERIFIKASI SKPKD	5	3.053.526
31	FUNGSI VERIFIKASI SPP PADA BKD	7	2.553.603
	FUNGSI VERIFIKASI SPP PADA BKD	6	2.551.910
	FUNGSI VERIFIKASI SPP PADA BKD	5	2.521.472
32	KEPALA BAGIAN KEUANGAN PADA RSUD	11	4.524.148
33	KEPALA BAGIAN TU PADA RSUD	11	4.524.148
34	FUNGSI VERIFIKASI SPP SKPD	7	1.979.042
	FUNGSI VERIFIKASI SPP SKPD	6	1.969.409
	FUNGSI VERIFIKASI SPP SKPD	5	1.943.153
35	FUNGSI VERIFIKASI SPP PADA INSPEKTORAT DAERAH	7	1.979.042
	FUNGSI VERIFIKASI SPP PADA INSPEKTORAT DAERAH	6	1.969.409
	FUNGSI VERIFIKASI SPP PADA INSPEKTORAT DAERAH	5	1.966.285
36	FUNGSI VERIFIKASI PADA BAGIAN HUKUM OLEH KASUBAG	9	3.107.981
	FUNGSI VERIFIKASI PADA BAGIAN HUKUM OLEH KASUBAG	8	3.077.255
	FUNGSI VERIFIKASI PADA BAGIAN HUKUM OLEH PELAKSANA	7	2.266.323
37	FUNGSI VERIFIKASI PADA BAGIAN HUKUM OLEH PELAKSANA	6	2.246.790
38	FUNGSIONAL PENGUJI KENDERAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN	7	2.266.323
	FUNGSIONAL PENGUJI KENDERAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN	6	2.246.790
	FUNGSIONAL PENGUJI KENDERAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN	5	2.220.746
39	OPERATOR APLIKASI SIMDA/SIPD SKPKD	7	3.032.404

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

	OPERATOR APLIKASI SIMDA/SIPD SKPKD	6	3.023.458
	OPERATOR APLIKASI SIMDA/SIPD SKPKD	5	3.007.260
40	OPERATOR / ADMIN APLIKASI SIPD PADA BAPERLITBANG DAN BKD	7	3.032.404
	OPERATOR / ADMIN APLIKASI SIPD PADA BAPERLITBANG DAN BKD	6	3.023.458
	OPERATOR / ADMIN APLIKASI SIPD PADA BAPERLITBANG DAN BKD	5	3.007.260
41	OPERATOR SIMDA SKPD / e-GOVERNMENT, PENERIMA SPM, HIBAH BANSOS / PENGUJI PADA BKD	7	2.777.043
	OPERATOR SIMDA SKPD / e-GOVERNMENT, PENERIMA SPM, HIBAH BANSOS / PENGUJI PADA BKD	6	2.773.815
	OPERATOR SIMDA SKPD / e-GOVERNMENT, PENERIMA SPM, HIBAH BANSOS / PENGUJI PADA BKD	5	2.752.800
42	OPERATOR SIMDA, SIRUP, e-GOVERNMENT, e-PROTEK PADA SKPD	7	2.234.403
	OPERATOR SIMDA, SIRUP, e-GOVERNMENT, e-PROTEK PADA SKPD	6	2.219.052
	OPERATOR SIMDA, SIRUP, e-GOVERNMENT, e-PROTEK PADA SKPD	5	2.197.613
43	OPERATOR SIMDA, SIRUP, e-GOVERNMENT, e-PROTEK PADA INSPEKTORAT DAERAH	7	2.298.243
	OPERATOR SIMDA, SIRUP, e-GOVERNMENT, e-PROTEK PADA INSPEKTORAT DAERAH	6	2.274.528
44	OPERATOR e-GOVERNMENT PADA BAG. EKONOMI PEMBANGUNAN DAN SKPD	7	2.266.323
	OPERATOR e-GOVERNMENT PADA BAG. EKONOMI PEMBANGUNAN DAN SKPD	6	2.246.790
	OPERATOR e-GOVERNMENT PADA BAG. EKONOMI PEMBANGUNAN DAN SKPD	5	2.220.746
45	OPERATOR APLIKASI SIM ASN, OPERATOR SIAK, OPERATOR SIMCARD KENDERAAN BERMOTOR	7	2.266.323
	OPERATOR APLIKASI SIM ASN, OPERATOR SIAK, OPERATOR SIMCARD KENDERAAN BERMOTOR	6	2.246.790

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	


	OPERATOR APLIKASI SIM ASN, OPERATOR SIAK, OPERATOR SIMCARD KENDERAAN BERMOTOR	5	2.220.746
46	PEMBANTU PENGUJI KENDERAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN	7	1.979.042
	PEMBANTU PENGUJI KENDERAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN	6	1.969.409
	PEMBANTU PENGUJI KENDERAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN	5	1.966.285
47	STAF Pada BKD	7	1.979.042
	STAF Pada BKD	6	1.969.409
	STAF Pada BKD	5	1.966.285
48	STAF Pada SKPD Selaku Satgas SPIP	7	2.266.323
	STAF Pada SKPD Selaku Satgas SPIP	6	2.246.790
	STAF Pada SKPD Selaku Satgas SPIP	5	2.220.746
49	KASUBAG KEUANGAN SKPD, KASUBAG PERENCANAAN SKPD	9	2.702.593
	KASUBAG KEUANGAN SKPD, KASUBAG PERENCANAAN SKPD	8	2.679.022
50	KASUBAG PERENCANAAN SKPD merangkap Keuangan (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan PU dan ITDA)	9	3.243.111
	KASUBAG PERENCANAAN SKPD merangkap Keuangan (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan PU dan ITDA)	8	3.222.067
51	KASUBAG PERENCANAAN merangkap KEUANGAN SKPD Lainnya	9	2.972.852
	KASUBAG PERENCANAAN merangkap KEUANGAN SKPD Lainnya	8	2.932.443
52	KASUBAG RUMAH TANGGA PADA	8	2.679.022
53	AUDITOR / P2UPD MADYA PADA ITDA	11	5.476.600
	AUDITOR / P2UPD MUDA PADA ITDA	9	4.684.494
	AUDITOR / P2UPD PERTAMA PADA ITDA	8	4.489.172
	AUDITOR / P2UPD PENYELIA PADA ITDA	8	4.344.360
54	JF PBJ MADYA	12	9.239.633
	JF PBJ MUDA	10	8.025.968
	JF PBJ PERTAMA	8	7.602.630
55	DOKTER UMUM PADA RSUD	12	5.158.795

Paraf	
OPD	Bag. Akum
	



	DOKTER UMUM PADA RSUD	11	5.119.430
	DOKTER UMUM PADA RSUD	10	5.074.483
	DOKTER UMUM PADA RSUD	9	5.044.840
	DOKTER UMUM PADA RSUD	8	5.032.217
56	PENYULUH Pertanian, Mantri Tani dan Petugas Lapangan Peternakan, Paramedik Veteriner	11	1.964.433
	PENYULUH Pertanian, Mantri Tani dan Petugas Lapangan Peternakan, Paramedik Veteriner	9	1.936.858
	PENYULUH Pertanian, Mantri Tani dan Petugas Lapangan Peternakan, Paramedik Veteriner	8	1.918.759
	PENYULUH Pertanian, Mantri Tani dan Petugas Lapangan Peternakan, Paramedik Veteriner	7	1.883.282
	PENYULUH Pertanian, Mantri Tani dan Petugas Lapangan Peternakan, Paramedik Veteriner	6	1.858.456
	PENYULUH Pertanian, Mantri Tani dan Petugas Lapangan Peternakan, Paramedik Veteriner	5	1.850.622
57	PARAMEDIS PADA RSUD DAN PUSKESMAS	11	1.488.207
	PARAMEDIS PADA RSUD DAN PUSKESMAS	9	1.486.426
	PARAMEDIS PADA RSUD DAN PUSKESMAS	8	1.448.120
	PARAMEDIS PADA RSUD DAN PUSKESMAS	7	1.436.402
	PARAMEDIS PADA RSUD DAN PUSKESMAS	6	1.414.646
	PARAMEDIS PADA RSUD DAN PUSKESMAS	5	1.411.099
58	SESPRI BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD/SEKDA	7	2.266.323
	SESPRI BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD/SEKDA	6	2.246.790
	SESPRI BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD/SEKDA	5	2.220.746
59	Koordinator Staf pada Bidang Pendidikan di Kecamatan	7	2.266.323
60	komandan Profos dan Satpol - PP	5	2.475.206
61	Petugas Anggota Profos pada Satpol-PP	3	1.959.773

3 TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

NO	JENIS JABATAN		JUMLAH TTP
1	KEPALA SEKOLAH TERPENCIL	11	1.726.320
	KEPALA SEKOLAH TERPENCIL	9	1.666.599

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

	KEPALA SEKOLAH TERPENCIL	8	1.665.338
	KEPALA SEKOLAH TERPENCIL	7	1.436.402
	KEPALA SEKOLAH TERPENCIL	6	1.414.646
	KEPALA SEKOLAH TERPENCIL	5	1.387.966
2	GURU SEKOLAH TERPENCIL	11	1.488.207
	GURU SEKOLAH TERPENCIL	9	1.441.383
	GURU SEKOLAH TERPENCIL	8	1.411.917
3	STAF SEKOLAH TERPENCIL	7	1.276.802
	STAF SEKOLAH TERPENCIL	6	1.275.955
	STAF SEKOLAH TERPENCIL	5	1.272.302
	STAF SEKOLAH TERPENCIL	4	1.165.373
	STAF SEKOLAH TERPENCIL	3	1.132.817
4	KEPALA PUSKESMAS	11	2.321.602
	KEPALA PUSKESMAS	9	2.297.204
	KEPALA PUSKESMAS	8	2.280.789
	KEPALA PUSKESMAS	7	2.266.323
5	KEPALA PUSKESMAS (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	11	2.797.828
	KEPALA PUSKESMAS (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	9	2.747.636
	KEPALA PUSKESMAS (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	8	2.715.225
	KEPALA PUSKESMAS (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	7	2.681.283
	STAF PUSKESMAS/PARAMEDIS (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	11	2.262.074
	STAF PUSKESMAS/PARAMEDIS (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	9	2.252.161
	STAF PUSKESMAS/PARAMEDIS (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	8	2.244.586
	STAF PUSKESMAS/PARAMEDIS (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	7	2.234.404
	STAF PUSKESMAS/PARAMEDIS (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	6	2.219.052



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

4 TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO	JENIS JABATAN		JUMLAH TTP
1	Dokter utama	14	5.179.969
	Dokter Madya	12	5.134.926
	Dokter Muda	10	5.089.883
	Dokter Pertama	9	5.044.840
2	DOKTER UMUM PADA PUSKESMAS	11	5.059.902
	DOKTER UMUM PADA PUSKESMAS	9	5.044.840
	DOKTER UMUM PADA PUSKESMAS	8	5.032.217
3	DOKTER GIGI PADA PUSKESMAS	11	5.059.902
	DOKTER GIGI PADA PUSKESMAS	9	5.044.840
	DOKTER GIGI PADA PUSKESMAS	8	5.032.217
4	DOKTER GIGI PADA RSUD	11	4.107.450
	DOKTER GIGI PADA RSUD	9	4.053.889
	DOKTER GIGI PADA RSUD	8	4.018.533
5	APOTEKER	11	3.154.998
	APOTEKER	9	3.107.981
	APOTEKER	8	3.077.255
	APOTEKER	7	3.064.324
	APOTEKER	6	3.051.197
	APOTEKER	5	3.007.260
6	DOKTER HEWAN /MEDIK VETERINER	11	3.154.998
	DOKTER HEWAN /MEDIK VETERINER	9	3.107.981
	DOKTER HEWAN /MEDIK VETERINER	8	3.077.255

5 TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	JENIS JABATAN		JUMLAH TTP
1	PETUGAS RODIOGRAFER	8	2.244.586
	PETUGAS RODIOGRAFER	7	2.234.403
	PETUGAS RODIOGRAFER	6	2.219.052
2	PERAWAT/PENATA ANASTESI	11	2.262.074
	PERAWAT/PENATA ANASTESI	9	2.252.161

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

	PERAWAT/PENATA ANASTESI	8	2.244.586
	PERAWAT/PENATA ANASTESI	7	2.234.403
	PERAWAT/PENATA ANASTESI	6	2.219.052
3	LABORATORIUM/ANALIS KESEHATAN	8	2.244.586
	LABORATORIUM/ANALIS KESEHATAN	7	2.234.403
	LABORATORIUM/ANALIS KESEHATAN	6	2.219.052
4	PETUGAS ELEKTROMEDIS / PERAWAT/PETUGAS HEMODIALISA	8	2.244.586
	PETUGAS ELEKTROMEDIS / PERAWAT/PETUGAS HEMODIALISA	7	2.234.403
	PETUGAS ELEKTROMEDIS / PERAWAT/PETUGAS HEMODIALISA	6	2.219.052

BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABRG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						